

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia mengalami transisi dari masa otoritarianisme ke masa demokrasi pascareformasi tahun 1998. Tentunya reformasi ini tidak hanya terjadi di bidang birokrasi dan ekonomi, tetapi juga reformasi di bidang konstitusi. Gintings (2006, hlm. 241) menyebutkan bahwa reformasi konstitusi menyangkut hal-hal krusial, misalnya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pembagian kekuasaan negara secara jelas, pemilihan anggota legislatif melalui pemilihan umum, dan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Dalam catatan sejarah politik Indonesia, pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dimulai tahun 2004. Pemilu Presiden 2004 merupakan pemilu presiden pertama setelah amandemen konstitusi. Menurut Gintings (2006, hlm. 245) masa pemilu presiden merupakan akhir dari masa transisi pascareformasi sekaligus awal dari masa kematangan demokrasi di Indonesia.

Pemilu presiden 2004 diikuti oleh lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilu presiden kali ini dilakukan melalui dua putaran. Putaran kedua pemilu presiden dilakukan pada tanggal 20 September 2004 yang memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia dengan masa bakti 2004-2009 (Ubaedillah dan Rozak, 2010, hlm. 83).

Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi pada Pemilu presiden tahun 2009. Pada pemilu presiden 2009 diikuti oleh lima calon pasangan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dua putaran. Pemenang pemilu presiden kali ini adalah *incumbent* Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Pada Pemilu Presiden 2009 muncul gugatan sengketa hasil pemilu presiden oleh peserta pemilu presiden dari kubu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto ke Mahkamah

Tiara Ayudia Virgiawati, 2014

Kesantunan Imperatif Dalam Masa Pemilu Presiden 2014 Pada Teks Berita Di Situs Rakyat Merdeka Online: Suatu Kajian Sosiopragmatik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Konstitusi. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari kubu Mega-Prabowo dan SBY-Boediono tetap menjadi presiden dan wakil presiden dengan masa bakti 2009-2014.

Sampailah pada tahun 2014, akhir masa bakti pemerintahan yang dipimpin SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden. Tentu saja ada suksesi kepemimpinan yang dilangsungkan melalui pemilu. Ada hal menarik dengan Pemilu Presiden 2014 ini. Dari segi jumlah, pemilu presiden kali ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusus Kalla. Dukungan rakyat Indonesia pun terpecah menjadi dua bagi nomor urut 1 atau 2.

Dari segi proses, pemilu presiden kali ini menyita perhatian khalayak karena dalam rangkaian proses memuat persoalan yang dikhawatirkan memicu konflik antarpemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masa kampanye dimulai 13 Juni 2014, namun sudah marak terjadi kampanye hitam bagi kedua kubu. Hal tersebut dibuktikan dalam berita yang terdapat dalam berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*.

The image shows a screenshot of a news article from the website **KANTOR BERITA POLITIK RMOL.CO**. The article title is **SBY: Pertarungan Pilpres Melebihi Kepatutan**, dated **Sabtu, 24 Juni 2014, 03:37:00 WIB**, and reported by **Laporan: Ade Mulyana**. The article features a photo of **JUSUS KALLA** with the caption **JUSUS KALLA yang disukai rakyat, kata SBY**. The text discusses the political competition between SBY and Jokowi, mentioning that SBY is not satisfied with the current situation and is looking for ways to win the presidential election. It also mentions that SBY is not satisfied with the current situation and is looking for ways to win the presidential election. The article is part of a series titled **UNTUK INDONESIA HEBAT INDONESIA RAYA**. To the right of the article is a sidebar with a banner for **Koreakini** and a section for **Rakyat Merdeka WE'RE ON SCOOP** featuring a tablet displaying news.

Tiara Ayudia Virgiawati, 2014

Kesantunan Imperatif Dalam Masa Pemilu Presiden 2014 Pada Teks Berita Di Situs Rakyat Merdeka Online: Suatu Kajian Sosiopragmatik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1 Berita terkait Kampanye Hitam yang Marak Terjadi

Sebagai contoh, di bawah ini adalah contoh kampanye hitam berupa memuat tulisan dan gambar yang menyudutkan pasangan lain.



(Sumber: google.com)

Gambar 1.2 Kampanye Hitam yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta



(Sumber: google.com)

Gambar 1.3 Kampanye Hitam yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK

Di hari pencoblosan pada 9 Juli 2014 muncul kembali persoalan, yaitu adanya perbedaan hasil perhitungan cepat (*quick count*) di media yang satu dan yang lain. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden saling mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat yang bersumber dari lembaga survei yang berbeda. Hal tersebut menimbulkan kembali kebingungan dan ketegangan antarpendingung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2.

Keputusan hasil pemilu yang sah bersumber dari hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan oleh KPU pada 22 Juli 2014. Pada rangkaian proses ini, kubu Prabowo-Hatta menarik diri dari proses rapat terakhir bersama KPU. Hal ini juga memicu kembali ketegangan antarpendingung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2.

Proses pemilu presiden telah usai hingga pengumuman pemenang Pemilu Presiden 2014, yaitu pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2009-2014. Namun, ternyata hal tersebut bukan puncak dari ketegangan selama pemilu presiden. Kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014 ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi. Hingga akhirnya sidang DKPP memutuskan beberapa anggota KPU dijatuhi sanksi dan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Tim Prabowo-Hatta.

Dari paparan sebelumnya perihal keseluruhan rangkaian Pemilu Presiden 2014 yang rawan terjadinya konflik horizontal antarpendingung, nampaklah perebutan kekuasaan untuk menjadi RI 1 dan 2 dalam Pemilu Presiden 2014 ini terbilang sengit. Perbedaan situasi dan masalah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dengan pemilu presiden tahun 2004 dan 2009 menarik untuk dicermati dan dikaji, tidak hanya dari segi politik, sosial, budaya tetapi juga dari segi bahasa.

Tentu saja dalam rangkaian proses pemilu tersebut, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2, maupun anggota tim sukses masing-masing yang notabene sebagai politisi menggunakan bahasa sebagai pertarungan dalam merebut kekuasaan. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas

dan Wareing (2007, hlm. 19) bahwa kekuasaan sering kali ditunjukkan lewat bahasa, dan bahkan kekuasaan diterapkan atau dilaksanakan lewat bahasa.

Leech (1993, hlm. 20) mengungkapkan bahwa tuturan dalam bahasa dipandang sebagai suatu aktivitas dan tindak verbal. Tuturan yang digunakan para politisi dalam masa Pemilu Presiden 2014 merupakan realisasi verbal dari aktivitas dan tindak verbal dari sikap politik yang dimiliki. Tuturan dari politisi pun turut memberi dampak bagi keadaan politik yang penuh ketegangan ini. Dari berbagai jenis tuturan, terdapat tuturan yang berisi ajakan, imbauan, perintah, permohonan, dan desakan para politisi. Tuturan-tuturan tersebut memiliki daya untuk memberikan pengaruh bagi para pendukungnya untuk menyamakan persepsi dan sikap serta melakukan apa yang diucapkan para politisi tersebut. Berikut ini adalah kutipan dari pernyataan yang diungkapkan oleh para politisi dalam menanggapi masalah selama rangkaian pemilu presiden berlangsung.

- (1) ***Mari** berpolitik santun dan dewasa. Kampanye-kampanye hitam itu membodohi masyarakat namanya.*
- (2) *Kami **mengimbau** Kapolri Jendral Sutarman agar menginstruksikan jajaran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat antisipatif untuk mencegah agar teror serupa tidak terjadi lagi menjelang Pilpres 2014.*
- (3) *Saya **instruksikan** saksi Prabowo-Hatta yang sedang hadir di KPU untuk tidak lagi lanjutkan proses rekapitulasi KPU.*
- (4) ***Mohon** kepada keduanya untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kemenangan. Kedua kandidat memiliki tim riset survei dengan hasil quick count hasilnya berbeda-beda.*
- (5) *Saya tegaskan bahwa sikap DMI sebagai organisasi **harus** netral dalam pilpres 2014 nanti.*

Kutipan di atas menunjukkan ajakan, imbauan, perintah, permohonan, dan desakan para politisi. Tuturan-tuturan tersebut memiliki daya untuk memberikan pengaruh bagi para pendukungnya untuk menyamakan persepsi dan sikap serta

melakukan apa yang diucapkan para politisi tersebut. Dalam Pragmatik, tuturan tersebut termasuk tuturan yang memiliki daya perlokusi berisi ajakan, imbauan, desakan, perintah, dan harapan. Tuturan yang berisi ajakan, imbauan, desakan, perintah, dan harapan bermakna imperatif (Rahardi, 2009, hlm. 12). Makna imperatif menurut Rahardi (2005, hlm. 9) memiliki skala kesantunan yang dapat dilihat dari langsung atau tidak langsungnya sebuah tuturan. Prinsip kesopanan yang diterapkan oleh para politisi dan masyarakat melalui tuturan bermakna imperatif di situasi sosial dan kelas sosial yang berbeda, sehingga pendekatan yang tepat dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiopragmatik (Leech, 1983, hlm. 15)

Proses demokrasi tidak hanya melibatkan politisi, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai subjek dan objek dari proses demokrasi itu sendiri. Masyarakat adalah partisipan dalam penyelenggaraan pemilu. Ketika penyelenggaraan pemilu berakhir dan terpilihnya pemimpin baru, masyarakat adalah pihak yang menjadi objek untuk melaksanakan kebijakan dari pemimpin baru tersebut. Maka dari itu, dalam masa pemilu presiden ini masyarakat diberi keleluasaan ruang untuk mengemukakan aspirasinya yang bersifat anjuran, larangan, desakan, harapan, ataupun ajakan. Masyarakat umum atau publik pun memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam diskusi politik untuk menanggapi sikap pernyataan elite politik atau saling menanggapi dengan sesama publik.

Ruang yang sangat memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut adalah ruang publik di dunia maya. Diskusi politik informal tersebut bisa dilakukan di grup-grup diskusi, misalnya saja pada kolom tanggapan yang terdapat di dalam berita situs *online*. Di situs berita *online*, berita yang disajikan oleh media dengan mudah bisa ditanggapi oleh masyarakat. Salah satu situs berita *online* yang memuat berita sekaligus tanggapan dari publik adalah situs *Rakyat Merdeka Online*. Dalam situs *Rakyat Merdeka Online*, berita terkait politik, terutama Pemilu Presiden 2014 lebih banyak diulas. Tanggapan publik untuk berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online* cukup tinggi dibandingkan situs berita lain.

Tiara Ayudia Virgiawati, 2014

Kesantunan Imperatif Dalam Masa Pemilu Presiden 2014 Pada Teks Berita Di Situs Rakyat Merdeka Online: Suatu Kajian Sosiopragmatik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Maka dari itu, penelitian mengenai kesantunan berbahasa, khususnya kesantunan imperatif politisi dan masyarakat di masa Pemilu Presiden 2014 ini dirasa perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa santun bahasa yang digunakan para politisi dan masyarakat. Dengan adanya penelitian yang mengkaji tuturan imperatif politisi dan masyarakat di situasi politik tertentu diharapkan memperkaya kajian linguistik, khususnya tentang kesantunan dalam wacana politik dengan pendekatan sosiopragmatik. Kesantunan imperatif adalah sebagian kecil dari berbagai hal yang memberikan gambaran tentang proses demokrasi di Indonesia dari sudut pandang kesantunan bahasa. Kematangan demokrasi yang santun dan beradab tercermin dari para politisi dan rakyat Indonesia memiliki sikap, baik ucapan maupun perilaku yang santun. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti kesantunan tuturan imperatif politisi dan masyarakat selama masa pemilu presiden 2014 yang terdapat di situs berita *online* dengan pendekatan sosiopragmatik.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengidentifikasian masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada teks berita Pemilu Presiden 2014 dengan telaah sosiopragmatik.

1.3 Batasan Masalah

Masalah pada penelitian ini akan dibatasi pada persoalan berikut ini. Tuturan-tuturan imperatif tersebut diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan penutur. Dalam hal ini pengklasifikasian penutur didasarkan oleh status sosial dari penutur tersebut. Secara garis besar, dalam ranah pemerintahan (politik) terdapat tiga jenis penutur, yaitu politisi, birokrat, dan masyarakat. Tuturan-tuturan tersebut juga dianalisis dari segi lingual. Hanya saja analisis pada bagian ini dibatasi hanya pada tataran sintaksis, yaitu jenis kalimat berdasarkan isi kalimat (kalimat deklaratif, imperatif, interogatif, eksklamatif, dan emfatik). Lalu mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang memiliki makna imperatif walaupun

Tiara Ayudia Virgiawati, 2014

Kesantunan Imperatif Dalam Masa Pemilu Presiden 2014 Pada Teks Berita Di Situs Rakyat Merdeka Online: Suatu Kajian Sosiopragmatik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konstruksi kalimatnya nonimperatif. Kemudian, kalimat bermakna imperatif tersebut diklasifikasikan berdasarkan wujud makna imperatif yang berjumlah 17 macam menurut Rahardi (2006).

Setelah tuturan-tuturan imperatif tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis maknanya. Kemudian, semua tuturan itu dihitung frekuensi kemunculan makna imperatif berdasarkan jenis makna. Perhitungan frekuensi kemunculan makna imperatif ini menggunakan rumus statistik sederhana untuk mengetahui makna imperatif mana yang sering digunakan oleh politisi dan masyarakat saat Pemilu Presiden 2014.

Adapun untuk mengetahui apakah tuturan imperatif politisi dan masyarakat tergolong tuturan imperatif yang santun atau tidak, analisis data selanjutnya adalah analisis wujud kesantunan makna sosiopragmatik menggunakan teori jenis tindak tutur berdasarkan bentuk menurut Wijana (1996) dan teori skala kesantunan Leech (1983). Kemudian tuturan imperatif tersebut dianalisis strategi kesantunan tuturan imperatif menurut Rahardi (2009) yang memiliki dua wujud kesantunan, yaitu kesantunan linguistik imperatif dan kesantunan pragmatik imperatif. Analisis terakhir yakni bagaimana publik menanggapi kesantunan imperatif politisi dan masyarakat dengan menggunakan teori *face* “muka” Brown dan Levinson (1987).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

- a) Bagaimana klasifikasi dan deskripsi makna sosiopragmatik imperatif tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- b) Berapa frekuensi kemunculan setiap makna sosiopragmatik imperatif yang terdapat dalam tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?

Tiara Ayudia Virgiawati, 2014

Kesantunan Imperatif Dalam Masa Pemilu Presiden 2014 Pada Teks Berita Di Situs Rakyat Merdeka Online: Suatu Kajian Sosiopragmatik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c) Bagaimana wujud kesantunan tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- d) Bagaimana strategi kesantunan imperatif yang digunakan politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- e) Bagaimana tanggapan publik terhadap kesantunan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a) penjelasan klasifikasi makna sosiopragmatik imperatif tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- b) penjelasan frekuensi kemunculan setiap makna sosiopragmatik imperatif yang terdapat dalam tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- c) penjelasan wujud kesantunan tuturan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- d) penjelasan strategi kesantunan imperatif yang digunakan politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?
- e) penjelasan tanggapan publik terhadap kesantunan imperatif politisi dan masyarakat pada masa Pemilu Presiden 2014 dalam teks berita di situs berita *Rakyat Merdeka Online*?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Berikut ini adalah uraian dari manfaat teoretis dan manfaat praktis.

- a) Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan sosiopragmatik dalam mengetahui kesantunan imperatif para politisi pada Pemilu Presiden 2014. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik kajian sosiopragmatik, khususnya terkait penggunaan bahasa pada wacana politik.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan gambaran bagaimana sebuah kesantunan dalam berkomunikasi juga ditunjukkan dengan kesantunan dalam menggunakan konstruksi kalimat imperatif. Bagi para politisi tentu sebaiknya memperhatikan hal tersebut agar tercipta sebagai politisi santun. Hasil penelitian ini adalah salah satu rujukan yang bisa dipakai oleh politisi untuk mempelajari strategi komunikasi dalam tuturan imperatif yang santun. Adapun bagi masyarakat, hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui aspek kesantunan berbahasa, baik itu politisi maupun masyarakat dalam proses berdemokrasi di Indonesia, khususnya pada momen Pemilu Presiden 2014.

1.7 Asumsi Dasar

Tuturan yang dituturkan oleh penutur tidak mungkin lepas dari konteks dan pasti memiliki maksud tertentu. Sama halnya dengan tuturan imperatif politisi dan masyarakat yang terdapat dalam bentuk tulisan pada teks berita Pemilu Presiden 2014.